

Revolusi Islam Iran: Komparasi antara Revolusi Sosial dan Revolusi Agama

Ismail Amin

Ilmu Pendidikan, Fakultas Al-Quran dan Ilmu-ilmu Keislaman
Universitas Internasional Almustafa Iran
e-mail : IsmailAmin@miu.ac.ir

Abstract

The 1979 Islamic Revolution in Iran stands as one of the most complex and challenging revolutions in modern history, as it not only overthrew the Pahlavi monarchy but also established an Islamic republic that integrates religious and political values. This article departs from the question: to what extent can the Iranian Islamic Revolution be explained through theories of social revolution and/or religious revolution? To address this, the study compares two theoretical perspectives: Theda Skocpol's theory of social revolution, which emphasizes structural and institutional factors, and Imam Ali Khamenei's concept of religious revolution rooted in Qur'anic values and spirituality. Using a qualitative approach and a descriptive-comparative method, this study finds that the Iranian Islamic Revolution cannot be fully understood solely through structural or spiritual lenses, but rather represents a unique synthesis of material change and ideological transformation—thereby offering a new model of revolution that transcends the conventional Western dichotomy between religion and the social.

Keywords: *Imam Khamenei, Islamic Revolution of Iran, Quranic Revolution, religious revolution, social revolution, Theda Skocpol*

Abstrak

Revolusi Islam Iran 1979 merupakan salah satu revolusi paling kompleks dan menantang dalam sejarah modern, karena tidak hanya menggulingkan monarki Pahlavi tetapi juga mendirikan sistem republik Islam yang menggabungkan nilai-nilai agama dan politik. Artikel ini bertolak dari pertanyaan: sejauh mana Revolusi

Islam Iran dapat dijelaskan melalui teori revolusi sosial dan/atau revolusi agama? Untuk menjawabnya, penelitian ini membandingkan dua perspektif teoritis: teori Revolusi Sosial Theda Skocpol yang menekankan faktor-faktor struktural dan kelembagaan, serta pandangan Imam Ali Khamenei tentang revolusi agama yang berakar pada nilai-nilai Al Quran dan spiritualitas. Dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-komparatif, penelitian ini menemukan bahwa Revolusi Islam Iran tidak dapat sepenuhnya dipahami hanya dari aspek struktural atau spiritual semata, melainkan merupakan sintesis unik antara perubahan material dan transformasi ideologis, sehingga menghadirkan model revolusi baru yang melampaui dikotomi konvensional Barat antara agama dan sosial.

Kata Kunci: Imam Khamenei, Revolusi Islam Iran, revolusi Qurani, revolusi sosial, revolusi agama, Theda Skocpol

Pendahuluan

Revolusi Islam Iran yang mencapai puncaknya pada tahun 1979 merupakan salah satu peristiwa politik paling signifikan dan kompleks di abad ke-20. Tidak seperti Revolusi Prancis atau Revolusi Bolshevik yang didominasi oleh ideologi sekuler dan aktor proletar, revolusi ini justru berakar pada nilai-nilai religius dan dipimpin oleh ulama. Karakteristik ini menjadikannya unik, bahkan dikategorikan sebagai “anomali” dalam literatur studi revolusi. Imam Khomeini, pemimpin utama revolusi, memadukan semangat keagamaan dengan gerakan anti-imperialis yang melampaui batas-batas nasional Iran, menjadikan revolusi ini tidak hanya sebagai perubahan rezim, melainkan sebagai proyek transformasi peradaban.

Sejak keberhasilannya, Revolusi Islam Iran menjadi objek studi dari berbagai pendekatan akademik. Ketidakstabilan ekonomi—seperti inflasi, polarisasi sosial, dan konflik kelas—berperan penting dalam melemahkan rezim Shah (Gholami & Khodadadi, 2016). Gagalnya realisasi janji Shah tentang “Peradaban Agung” semakin meruntuhkan legitimasi kekuasaannya (Vatandoust & Sheipari, 2023). Revolusi Iran 1979 didorong oleh kontradiksi sosial-politik yang lahir dari kebijakan modernisasi Shah, yang tidak berhasil meningkatkan taraf hidup rakyat dan justru memperdalam ketimpangan sosial-ekonomi (Prorochenko, 2020). Di sisi lain, revolusi ini juga digerakkan oleh kombinasi ideologis antara konsep keadilan sosial dalam tradisi Syiah dan wacana anti-imperialisme Marxis-Leninis, yang membentuk visi ekonomi gerakan revolusioner (Pesaran, 2008).

Sejumlah pemikir menemukan bahwa nilai Islam-lah yang menjadi penyebab revolusi. Artikel dari Kusumo menunjukkan bahwa salah satu dorongan utama di balik Revolusi Iran adalah aspirasi untuk menghidupkan kembali kejayaan peradaban Islam dari sudut pandang Syiah (Kusumo, 2024). Selain itu, prinsip *Wilāyat al-Faqīh* (Kepemimpinan Ulama) dipandang sebagai kekuatan ideologis sentral yang mendorong terjadinya Revolusi Islam di Iran (Ibrahimian, 2024). Gagasan Khomeini tentang pemerintahan Islam sebagai sistem politik revolusioner juga memainkan peran penting dalam menggerakkan dinamika revolusi tersebut (Hakim, 2018).

Artikel ini secara khusus akan membandingkan pemikiran Theda Skocpol yang mengemukakan teori revolusi sosial dan pemikiran Revolusi Qurani dari Imam Ali Khamenei. Skocpol, melalui karyanya *States and Social Revolutions* (1979), menekankan pentingnya kondisi objektif seperti krisis negara dan dinamika internasional dalam menjelaskan terjadinya revolusi. Dalam karya berikutnya, *Rentier State and Shi'a Islam in the Iranian Revolution* (1982), Skocpol mengakui keunikan Revolusi Islam Iran, namun ia tetap berusaha memasukkannya dalam kerangka revolusi sosial klasik. Sementara itu, Imam Ali Khamenei menempatkan revolusi ini sebagai manifestasi dari perjuangan spiritual dan moral yang berakar pada ajaran Al Qur'an, dengan tujuan utama menegakkan keadilan Ilahi dan kesadaran tauhid dalam masyarakat.

Perbandingan pemikiran Skocpol dan Khamenei menjadi penting karena keduanya mewakili dua arus besar dalam studi revolusi: pendekatan struktural versus pendekatan transendental. Skocpol berbicara dari sudut pandang ilmu sosial Barat yang menekankan determinasi material dan institusional, sedangkan Khamenei merepresentasikan paradigma Islam revolusioner yang berfokus pada transformasi ruhani dan ideologis sebagai inti perubahan sosial. Artikel ini bertujuan mengungkap perbedaan antara struktur dan spiritualitas sebagai basis revolusi sehingga dapat memperkaya pemahaman publik mengenai Revolusi Islam Iran. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka dengan memanfaatkan data berupa pidato, buku, dan tulisan Imam Ali Khamenei serta dua karya ilmiah dari Theda Skocpol (1979 dan 1982).

Revolusi Sosial dalam Perspektif Struktural Theda Skocpol

Skocpol mendefinisikan “revolusi sosial” sebagai sebuah transformasi yang cepat dan mendasar pada masyarakat dan struktur kelas di negara itu; dan dihasilkan sebagiannya dari revolusi berbasis kelas dari kalangan bawah. Revolusi sosial merupakan kombinasi dari dua kejadian yang bersamaan, yaitu “perubahan struktural masyarakat dengan pergolakan kelas” dan “transformasi politik dengan transformasi sosial.” Dengan kata lain, revolusi sosial mengubah struktur politik dan sosial sekaligus;

dan perubahan itu terjadi melalui konflik sosial-politik yang intense, dimana pertarungan antarkelas berperan penting dalam revolusi ini (Skocpol 1979: 4-5).

Revolusi sosial berbeda dengan “pemberontakan,” yang mungkin saja melibatkan kebangkitan revolusioner dari kalangan bawah, namun mereka tidak menghasilkan perubahan struktural. Revolusi sosial juga berbeda dengan revolusi politik, karena revolusi politik mentransformasi struktur negara, namun tidak mengubah struktur sosial; dan tidak selalu dihasilkan melalui konflik antarkelas (Skocpol 1979: 4).

Dalam bukunya, Skocpol membandingkan Revolusi Prancis (1789), Revolusi Rusia (1917), dan Revolusi Tiongkok (1949). dan menemukan bahwa revolusi-revolusi itu tidak disebabkan oleh hancurnya power administrative dan militer negara-negara itu, dan kehancuran itu terjadi karena kerajaan terjebak dalam “..dalam tekanan silang antara meningkatnya persaingan militer atau gangguan dari luar negeri, dan kendala yang diberlakukan pada tanggapan monarki oleh struktur kelas agraria dan lembaga politik yang ada” (Skocpol 1979: 285).

Dengan komparasi itu, ia berupaya menjelaskan bahwa revolusi sosial besar terjadi sebagai hasil dari interaksi antara struktur negara, tekanan internasional, dan dinamika kelas—bukan sekadar karena ideologi atau gerakan individu. Tiga penyebab umum utama terjadinya revolusi sosial adalah sebagai berikut.

Pertama, krisis negara (*state breakdown*), yaitu negara kehilangan kapasitas untuk menjalankan fungsi dasar—terutama karena kegagalan fiskal dan militer—biasanya dipicu oleh kekalahan perang atau tekanan internasional. Revolusi terjadi karena negara-negara yang ada mengalami keruntuhan dan tidak lagi mampu menjaga ketertiban atau melaksanakan kebijakan secara efektif (Skocpol 1979: 29). Ia mengkritik teori revolusi yang hanya menekankan konflik kelas, dan menambahkan bahwa revolusi **muncul ketika negara kehilangan kapasitas koersif dan administratif**.

Kedua, konflik kelas di pedesaan, yaitu revolusi sosial muncul karena kelas bawah pedesaan (petani) memberontak terhadap kelas tuan tanah. Ciri-ciri utama masyarakat agraris yang membuatnya rentan terhadap transformasi revolusioner adalah bentuk-bentuk dominasi dan eksploitasi yang berlangsung di pedesaan. (Skocpol 1979: 113). Skocpol menjelaskan bahwa **hubungan kekuasaan antara tuan tanah dan petani** di pedesaan sangat menentukan kemungkinan munculnya revolusi. Ketika dominasi tuan tanah lemah atau dilemahkan oleh krisis negara, petani memiliki peluang untuk memberontak.

Ketiga, tekanan internasional. Revolusi sosial tidak hanya ditentukan oleh dinamika internal (struktur sosial domestik), tetapi juga oleh konteks dan tekanan internasional.

Seperti ditulis Skocpol, Dalam ketiga kasus tersebut [Prancis, Rusia, dan Cina], tekanan militer dan diplomatik internasional turut mempercepat terjadinya krisis internal dengan memperlihatkan kelemahan institusi negara (Skocpol 1979: 288). Di sini Skocpol menekankan bahwa tekanan militer dari luar negeri, seperti peperangan, kompetisi ekonomi, atau ancaman kekuatan asing, sering mendorong krisis legitimasi dan memperburuk konflik sosial internal.

Jadi, dalam pandangan Skocpol, revolusi terjadi bukan karena kehendak revolusioner semata, atau ideologi revolusioner, tetapi karena runtuhnya negara dan transformasi struktur kelas agraris, dalam konteks internasional yang menekan. Secara khusus, Skocpol menggunakan frasa, "Revolutions are not made; they come." Maksudnya, revolusi tidak dibuat/direncanakan, tetapi terjadi begitu saja ketika tiga sebab tersebut muncul. Ia tetap mengakui bahwa organisasi revolusioner dan ideologi membantu dalam merekatkan solidaritas di antara para pelopor revolusi sebelum dan selama terjadinya krisis; dan ideologi dan organisasi itu sangat membantu dalam memfasilitasi konsolidasi rezim baru pasca revolusi. Namun tidak mungkin para pelopor revolusi itu beserta ideologi mereka, menciptakan krisis revolusi (3 penyebab revolusi). (Skocpol 1979: 17)

Analisis Revolusi Islam Iran berdasarkan Pemikiran Skocpol 1982

Dalam papernya 1982, Skocpol menilai revolusi Islam Iran memiliki kesesuaian dengan teorinya. Skocpol menyimpulkan bahwa Revolusi Islam Iran masuk kategori "revolusi sosial" karena berbasis massa dan secara menyeluruh mengubah hubungan sosial-budaya dan sosial-ekonomi dasar di Iran, tidak sekedar mengubah institusi-institusi pemerintahan (Skocpol, 1982: 266). Namun ada perbedaan yang sifatnya anomali dari kajian Skocpol pada 1979, yaitu sisi bahwa "revolusi Iran dibuat," dimana ulama Iran, Ayatullah Khomeini, menjadi pemberi arahan dan semua sektor masyarakat perkotaan Iran menyatu di bawah naungan ideologi Islam Syiah, untuk melawan rezim Shah melalui aksi-aksi demonstrasi massa yang sangat masif di perkotaan (Skocpol, 1982: 267).

1. State Breakdown

Skocpol menekankan bahwa kehancuran rezim terjadi bukan semata karena niat revolusioner, tetapi karena ketidakmampuan negara mempertahankan *status quo* (Skocpol, 1979). Sebagaimana yang terjadi di Prancis, Rusia, dan China, monarki Iran juga dipimpin oleh raja yang absolut, militer dan polisi yang kejam, yang mengintimidasi rakyat.

Dalam kerangka strukturalisme Skocpol, revolusi meletus ketika negara gagal memenuhi fungsinya sebagai penjaga stabilitas dan pemelihara konsensus elite. Rezim Pahlavi, meskipun tampak kuat dari luar—ditopang oleh militer modern, kekayaan minyak, dan aliansi strategis dengan Amerika Serikat—sebenarnya menyimpan kerentanan yang dalam. Kerentanan ini bukan hanya akibat kegagalan institusional, tetapi juga ketergantungan akut terhadap kekuatan asing dan alienasi sosial-politik yang meluas di kalangan rakyat Iran. Dalam kerangka Skocpol, negara Iran pada masa ini merupakan negara rentan (*fragile state*), karena bergantung pada militer yang dibentuk oleh dukungan Amerika Serikat dan memiliki birokrasi yang lemah dalam membangun legitimasi internal.

Hal ini tampak pada fenomena kegagalan militer dan polisi Iran yang memiliki personel 300.000 orang dalam mencegah keruntuhan rezim Shah, padahal tidak ada konflik bersenjata, dan tidak ada tekanan internasional. Bahkan, selain Shah tidak bisa mempertahankan takhtanya, angkatan bersenjata sendiri pun tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Shah dan institusi angkatan bersenjata Iran akhirnya menyerah pada gerakan revolusi yang berbasis massa di dalam negeri dan kemudian berubah secara struktural di bawah pemerintahan baru (Skocpol, 1982: 267).

2. Konflik Kelas di Pedesaan

Skocpol menulis bahwa dalam berbagai revolusi sosial, pemberontakan yang paling signifikan secara politik berakar pada komunitas pedesaan yang dirusak oleh perubahan sosial akibat kebijakan modernisasi rezim. Namun, untuk Iran, nasis pemberontakan rakyat justru tidak di pedesaan melainkan di perkotaan (Skocpol, 1982). Dalam kasus Iran, Skocpol mengamati bahwa kelemahan struktur negara Pahlavi, ketergantungan ekonomi pada ekspor minyak, dan tekanan politik internasional menjadi prasyarat terjadinya revolusi. Meski demikian, ia mencatat bahwa aktor utama revolusi ini bukanlah kelas proletar, melainkan institusi religius yang memiliki jaringan luas dan kepercayaan masyarakat (Skocpol, 1982).

Peran Sentral Ulama dalam Revolusi Sosial Iran

Berbeda dengan kajiannya di buku tahun 1979, artikel Skocpol 1982 secara khusus menegaskan bahwa revolusi sosial di Iran sangat dipengaruhi oleh ideologi. Ia menulis bahwa untuk menemukan jawaban mengapa secara sangat tidak biasa begitu banyak orang Iran bersedia menghadapi kematian dalam demonstrasi massa demi menggulingkan Shah, kita perlu membahas posisi organisasi keagamaan dan kepercayaan Syiah dalam masyarakat dan politik Iran (Skocpol, 1982: 272).

Skocpol menjelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan Shah yang menentang ulama, misalnya dengan melakukan program-program modernisasi (dalam konteks “westernisasi”) untuk menyerang ulama Syiah, bahkan kemudian melakukan represi kepada ulama-ulama Syiah, termasuk dengan membuang Ayatullah Khomeini yang sejak tahun 1960-an aktif berorasi menentang kebijakan Shah, ke luar negeri. Namun, Khomeini melanjutkan gerakan politiknya. Seruan dan pesan Khomeini secara bertahap menjadi dominan di kalangan pelajar di Qom, dan menyebar ke seluruh Iran dan kemudian tersambung dengan kemukakan rakyat Iran yang meluas terhadap kebijakan Shah (Skocpol, 1982: 274).

Uraian yang diberikan Skocpol juga terkonfirmasi dalam tulisan beberapa penulis lain. Kurzman menilai bahwa ulama Syiah memainkan peran strategis, bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai penggerak politik yang menghubungkan elite moral dengan massa. Jaringan masjid, seminar, dan khotbah Jumat menjadi medium mobilisasi efektif, terutama karena masjid relatif otonom dari kontrol negara (Kurzman, 2004). Dengan demikian, mereka tetap utuh sementara organisasi oposisi lainnya ditekan oleh pemerintah. Kebebasan relatif ini, bersama dengan banyaknya jumlah Masjid di Iran—diperkirakan mencapai 9.015 pada pertengahan 1970-an—berarti bahwa Ulama mampu menjangkau setiap lingkungan, desa, dan kota; menyediakan jaringan nasional di mana demonstrasi dapat diorganisir, sehingga memobilisasi populasi dan mendorong upaya revolusioner.

Penyebaran kaset pidato Ayatollah Khomeini, yang mencapai lebih dari 100.000 kopi pada akhir 1978 (Hooglund, 1980), memperlihatkan bagaimana simbolisme agama diartikulasikan untuk membangkitkan semangat revolusioner. Kaum bazaar—pedagang dan pengusaha tradisional—memiliki hubungan historis dengan ulama. Mereka terdorong ke dalam gerakan revolusioner akibat kebijakan liberalisasi ekonomi Shah yang menguntungkan korporasi asing dan elite baru. Dukungan finansial dan logistik dari bazaar, termasuk selama pengasingan Khomeini di Irak dan Prancis, memperkuat fondasi material gerakan revolusioner.

Keddie (2006) menekankan bahwa keberhasilan revolusi Iran terletak pada kemampuannya menyatukan kelas-kelas sosial yang sebelumnya terfragmentasi. Ulama Syiah, yang memiliki akar historis dalam masyarakat dan kepercayaan rakyat, bertindak sebagai penghubung antara elite moral dengan massa. Di sisi lain, para pedagang (bazaari) yang merasa terdesak oleh penetrasi ekonomi kapitalis dan kebijakan liberalisasi ekonomi ala Shah, menemukan kepentingan yang sejalan dengan retorika keadilan sosial dan anti-imperialisme dari Imam Khomeini. Kelas menengah perkotaan, termasuk mahasiswa dan intelektual, memainkan peran penting dalam mendiseminasi

wacana revolusioner dan memperluas jaringan mobilisasi politik melalui universitas dan publikasi bawah tanah.

Peran sentral ideologi agama, khususnya Islam Syiah, serta kemunculan kepemimpinan religius yang kharismatik dalam diri Imam Khomeini, menjadi faktor penentu yang membedakan revolusi ini dari kasus-kasus revolusi sosial sebelumnya yang dijadikan rujukan oleh Skocpol—yakni Revolusi Prancis, Rusia, dan Tiongkok. Dalam revolusi Iran, agama tidak semata berfungsi sebagai identitas kultural pasif, melainkan menjadi motor penggerak mobilisasi, pembentukan visi alternatif terhadap negara, dan penyatuan berbagai elemen masyarakat dalam satu narasi perjuangan transformatif.

3. Tekanan Internasional

Dalam kerangka teori revolusi Theda Skocpol, tekanan internasional menjadi salah satu elemen krusial yang melemahkan kapasitas negara dalam menghadapi krisis domestik. Skocpol menekankan bahwa krisis legitimasi dan memburuknya konflik sosial internal disebabkan oleh tekanan militer dari luar negeri, seperti peperangan atau ancaman kekuatan asing, sering mendorong krisis legitimasi dan memperburuk konflik sosial internal. Selain itu, menurut Skocpol, revolusi tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa negara-negara hidup dalam sistem dunia yang saling bersaing. Negara yang gagal merespons perubahan-perubahan global, seperti industrialisasi negara pesaing, bisa runtuh dan memicu krisis internal.

Dalam kasus Iran pra-Revolusi, ketergantungan Iran pada Amerika Serikat justru memperparah persepsi rakyat terhadap rezim; rezim Shah dianggap sebagai proksi kekuatan asing. Apalagi, dalam sejarahnya, rakyat Iran berkali-kali menyaksikan kejahatan AS dan Inggris, seperti keterlibatan CIA dalam kudeta 1953 terhadap Perdana Menteri Mohammad Mossadegh dan pembentukan dinas intelijen SAVAK yang sangat kejam terhadap rakyat, dengan pelatihan dari Mossad dan CIA. Fenomena ini memperkuat narasi bahwa Shah adalah boneka imperialisme global. Hal ini memunculkan sentimen anti-Barat yang sangat kuat dalam diskursus publik Iran menjelang 1979.

Di sisi ekonomi, ekspansi besar-besaran anggaran militer dan proyek-proyek modernisasi infrastruktur pada awal 1970-an—yang dibiayai oleh lonjakan pendapatan minyak pasca embargo OPEC 1973—justru menciptakan ketimpangan yang dalam. Inflasi meroket, urbanisasi tak terkendali, dan krisis perumahan menciptakan tekanan sosial di kalangan kelas bawah dan menengah. Negara tidak mampu merespons tuntutan ekonomi dengan kebijakan distributif yang adil, karena sumberdaya telah terkooptasi dalam lingkaran elite birokrasi dan kroni monarki. Ketegangan geopolitik di

kawasan, terutama pasca Perang Arab-Israel dan pengaruh Revolusi Hijau global, turut menyumbang pada krisis legitimasi internal.

Menurut Afary dan Anderson (2005), bantuan militer, pelatihan personel keamanan, hingga transfer teknologi persenjataan canggih dari Washington membuat Iran menjadi negara klien yang terikat secara struktural dengan kepentingan blok Barat dalam Perang Dingin. Hal ini memperlemah legitimasi internal rezim Pahlavi dan memantik resistensi di kalangan rakyat, terutama dari kelompok Islamis, nasionalis, dan Marxis yang melihat Shah sebagai perpanjangan tangan kolonialisme baru (neo-colonialism).

Fischer (1980) menekankan bahwa struktur politik Iran pada dekade 1970-an semakin mengalami tekanan karena pertentangan antara agenda modernisasi yang diarahkan oleh Barat dan realitas sosio-kultural lokal yang tetap religius dan konservatif. Ketergantungan terhadap teknologi dan produk luar negeri, serta konsumsi elite yang mencolok dan berorientasi Barat, menciptakan jurang simbolik antara negara dan masyarakat. Dalam perspektif struktural, ini merupakan manifestasi dari cultural disarticulation, yakni ketidakselarasan antara suprastruktur ideologis negara dengan basis nilai-nilai masyarakat.

Konsep Revolusi Agama dalam Pandangan Imam Sayyid Ali Khamenei

Revolusi Qurani sebagai Gerakan Ontologis dan Epistemologis

Revolusi Islam Iran 1979 tidak hanya mencerminkan transformasi politik di wilayah Timur Tengah, tetapi juga menandai kelahiran suatu paradigma revolusioner baru yang berbasis pada nilai-nilai ilahiah. Imam Sayyid Ali Khamenei, sebagai pemimpin spiritual dan politik pasca-Khomeini, secara konsisten menegaskan bahwa revolusi sejati bukan sekadar pergantian kekuasaan atau perubahan sistem pemerintahan, melainkan gerakan ontologis dan epistemologis yang berpijak pada wahyu. Dalam pelbagai pidatonya, terutama dalam peringatan Hari Revolusi Islam dan Hari Quds Internasional, Khamenei menegaskan bahwa Revolusi Islam Iran merupakan kelanjutan dari *harakat al-anbiya'* (gerakan para nabi), yakni misi tauhid yang bertujuan menegakkan keadilan dan membebaskan manusia dari dominasi *thaghut* (tirani). Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT: *“Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi, dan menjadikan mereka pemimpin serta menjadikan mereka pewaris”* (QS. al-Qashash [28]: 5).

Revolusi Qurani, sebagaimana dikonsepsikan oleh Khamenei, bukanlah agenda jangka pendek yang terfokus pada perombakan institusional, melainkan proses panjang

menuju pembentukan masyarakat ilahi (*al-mujtama' al-ilāhī*). Proses ini mencakup dimensi spiritual, sosial, kultural, dan epistemologis yang saling terintegrasi, dengan Al-Qur'an sebagai kerangka normatif dan sumber inspiratif utama. Karena itu, Revolusi Islam Iran, dalam pandangan ini, memiliki cakupan universal dan relevansi lintas bangsa. Ia bukan semata proyek politik, melainkan juga model perlawanan global terhadap hegemoni modernitas sekular dan sistem imperialis.

Ayyamullah dan Kesadaran Historis Transenden

Salah satu kategori konseptual yang krusial dalam kerangka revolusi Qurani adalah *ayyamullāh*, yaitu hari-hari bersejarah dalam perjalanan umat manusia yang menjadi manifestasi intervensi Ilahi. Khamenei merujuk pada QS. Ibrahim [14]: 5: *“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami... agar engkau mengeluarkan kaummu dari kegelapan menuju cahaya dan mengingatkan mereka tentang hari-hari Allah.”* Berdasarkan ayat ini, Revolusi Islam diposisikan sebagai bagian dari *ayyamullāh kontemporer*—sebuah titik balik sejarah yang membangkitkan kesadaran kolektif umat atas peran transenden Tuhan dalam perubahan sosial.

Pilar-Pilar Ideologis Revolusi Qurani

Dalam dimensi ideologis, revolusi Qurani sebagaimana dirumuskan oleh Khamenei bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, tauhid sebagai pusat orientasi keadilan mutlak dan penolakan terhadap segala bentuk penyekutuan dalam kekuasaan (QS. al-Baqarah [2]: 256). Kedua, keadilan sosial sebagai inti dari misi kenabian dan fondasi tatanan sosial Qurani (QS. al-Hadid [57]: 25). Ketiga, perlawanan terhadap kezaliman global sebagai bentuk jihad politik dan spiritual (QS. al-Nisa' [4]: 75). Dalam pidatonya memperingati empat dekade Revolusi Islam, Khamenei menegaskan: *“Revolusi Islam adalah kelanjutan dari gerakan para nabi. Ia adalah kebangkitan untuk menumbangkan dominasi kekuatan arogan dan membentuk masyarakat Qurani yang adil”* (Khamenei, 1394 Hs, 15).

Dengan kerangka tersebut, revolusi bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan menuju peradaban ilahi yang didasarkan pada spiritualitas, ilmu pengetahuan, dan keadilan. Hal ini bersandar pada konsep kekhalifahan manusia (*al-insān al-khalīfah*) sebagaimana tertuang dalam QS. al-Baqarah [2]: 30. Ayat ini memperlihatkan mandat transenden bagi manusia untuk membangun masyarakat tauhidi yang mewujudkan nilai-nilai wahyu dalam realitas sosial. Khamenei juga menekankan ayat QS. Muhammad [47]: 7 sebagai legitimasi teologis bahwa perjuangan yang dilandasi niat suci akan selalu mendapatkan pertolongan Tuhan: *“Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.”*

Konsekuensi dari revolusi Qurani adalah adanya jihad melawan kekuatan *thaghut*, sebagaimana diteladankan oleh Nabi Ibrahim (QS. al-Mumtahanah [60]: 4) dan Nabi Muhammad saw. (QS. al-Fath [48]: 29). Dalam pidatonya pada tahun 2010, Khamenei menyatakan: “Revolusi ini lahir dari ruh *la ilaha illa Allah* dan semangat *kalla innama ma’iya rabbī sayahdīn*—tidak ada ketundukan selain kepada Tuhan, dan keyakinan bahwa Tuhan akan memberi jalan.” Konsepsi ini menegaskan bahwa Revolusi Islam merupakan revolusi *ma’nawī* (spiritual) dan *basīrah* (kesadaran mendalam), berbeda dari revolusi modern yang hanya didasarkan pada tuntutan ekonomi atau strukturalisme sekuler. Dalam pidato di Qom tahun 2009, beliau menegaskan: “Apa yang membuat Revolusi Islam tetap hidup hingga kini adalah karena ia bersumber dari Al-Qur’an. Bila ruhnya adalah Al-Qur’an, maka ia tidak akan pernah mati.”

Aspek paling menonjol dari konstruksi revolusi Qurani dalam pemikiran Khamenei adalah semangat anti-tirani dan perlawanan terhadap sistem hegemonik global. Bagi beliau, Revolusi Islam tidak hanya menumbangkan monarki dalam negeri, tetapi juga membangkitkan semangat pembebasan umat dan bangsa-bangsa tertindas untuk melawan sistem dunia yang didasarkan pada ketimpangan struktural. QS. al-Nisa’ [4]: 75 dijadikan sebagai fondasi normatif: “Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang tertindas di antara laki-laki, wanita dan anak-anak...” Ayat ini dipahami sebagai seruan universal yang melintasi batas geografis dan historis. “Revolusi Islam telah mengubah logika diam dan tunduk umat menjadi logika perlawanan dan harga diri,” tegas Khamenei dalam berbagai kesempatan.

Revolusi Sebagai Madrasah Perlawanan dan Proyek Peradaban

Dalam pidato Hari Quds 2022, ia menyatakan bahwa perjuangan melawan Zionisme dan imperialisme adalah bagian integral dari mandat revolusi. Konsep ini kemudian dirumuskan sebagai *maktab al-muqāwamah* (madrasah perlawanan), yang telah melahirkan jaringan poros perlawanan dari Palestina, Lebanon, Irak, Yaman, hingga kawasan lain di dunia Muslim. Hal ini juga didukung oleh studi Mohsen Milani dalam artikelnya *Iran’s Islamic Revolution and the International System* (2006), yang menyatakan bahwa sejak 1979, Iran telah secara sadar membangun identitas sebagai negara yang memimpin perlawanan terhadap ketidakadilan global. Demikian pula, H. E. Chehabi dalam studinya *The Politics of Anti-Imperialism in Iran* (1993) menunjukkan bahwa Revolusi Islam mengintegrasikan narasi anti-kolonial dan anti-imperialis ke dalam kerangka teologis Qurani yang berkelanjutan.

Perlawanan, dalam kerangka ini, bukanlah respons strategis sesaat, tetapi posisi ideologis dan teologis yang konsisten. Khamenei sering merujuk pada QS. Hud [11]: 113: “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan

kamu disentuh api neraka...” Ayat ini menjadi dasar normatif dalam menolak segala bentuk kompromi dengan kekuatan zalim, termasuk dalam konteks normalisasi dengan rezim Zionis. Dalam pidato Konferensi Persatuan Islam tahun 2018, ia menegaskan: *“Perlawanan kita terhadap Amerika dan Zionisme bukan karena nasionalisme atau kebencian emosional, tetapi karena kita mengikuti jalan para nabi yang memerangi Fir’aun dan Namrud. Ini adalah jalan Ibrahim, Musa, dan Muhammad saw.”*

Dengan demikian, konsep revolusi Qurani yang dirumuskan oleh Imam Sayyid Ali Khamenei adalah kerangka filosofis, teologis, dan historis yang menghubungkan spiritualitas Islam, kesadaran kenabian, dan perjuangan melawan ketidakadilan global. Ia bukan sekadar peristiwa politik, tetapi sebuah gerakan peradaban yang berpijak pada wahyu dan nilai-nilai transenden yang terus hidup dalam denyut zaman.

Simpulan

Revolusi Islam Iran 1979 menunjukkan bahwa tidak ada satu model tunggal yang dapat sepenuhnya menjelaskan dinamika revolusi dalam masyarakat Muslim kontemporer. Di satu sisi, teori struktural Theda Skocpol relevan dalam menjelaskan keruntuhan institusi negara Pahlavi akibat krisis legitimasi, tekanan internasional, serta ketimpangan sosial yang meluas. Namun di sisi lain, teori tersebut terbatas dalam menangkap dimensi ideologis dan spiritual yang menjadi penggerak utama revolusi ini. Perspektif Imam Khamenei menunjukkan bahwa Revolusi Islam bukan hanya respon terhadap krisis struktural, tetapi juga merupakan gerakan profetik yang mentransformasikan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip wahyu, keadilan ilahi, dan penolakan terhadap tirani.

Perbandingan kedua pendekatan ini mengungkap bahwa Revolusi Islam Iran merupakan sintesis unik antara realitas material dan visi spiritual. Ia tidak hanya menggulingkan kekuasaan lama, tetapi juga membentuk sistem politik baru yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar institusional negara. Ini menantang asumsi-asumsi modernisasi Barat yang menganggap revolusi sebagai jalan menuju sekularisme, dan menunjukkan kemungkinan terbentuknya “modernitas religius” yang otoritatif sekaligus rasional.

Dengan demikian, studi ini menyarankan perlunya pendekatan multidisipliner dalam memahami revolusi, yang tidak hanya mengandalkan analisis struktural, tetapi juga memberi ruang bagi agensi, makna, dan simbol religius. Revolusi Islam Iran menjadi contoh penting dari revolusi yang berhasil mengintegrasikan krisis sosial dengan

kesadaran spiritual kolektif—suatu model alternatif yang relevan untuk konteks dunia Muslim saat ini.

Daftar Pustaka

- Afary, J. & Anderson, K.B. (2005). *Foucault and the Iranian Revolution: Gender and the Seductions of Islamism*. Chicago: University of Chicago Press.
- Chehabi, H.E. (1993). The Politics of Anti-Imperialism in Iran. Dalam John L. Esposito, ed., *Islam and Politics in the Middle East*. London: Palgrave Macmillan.
- Chehabi, H.E. (1993). *The Politics of Anti-Imperialism in Iran, Middle Eastern Studies*, vol. 29, no. 3, hlm. 460–475.
- Fischer, M.M.J., 1980. *Iran: From Religious Dispute to Revolution*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- H. Gholami, H. & Khodadadi, B. (2016). Criminal Policy as a Product of Political and Economic Conditions: Analyzing the Developments in Iran since 1979. *Jurnal ZSTW*, [online] 128(2), 606-627. Dalam: <https://doi.org/10.1515/zstw-2016-0022> [Diakses 15 Juni 2025]
- Hakim, S.A. (2018). Islam and government: an analytical review on Khumayni's Kashf al-Asrār and Wilāyat al-Fāqih. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, [online] 8(1), 147-171. Dalam: <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V8I1.147-171> [Diakses 15 Juni 2025]
- Hooglund, E. (1980). *Rural Participation in the Revolution*, MERIP Reports, no. 87, hlm. 3.
- Ibrahimian, H. (2024). Velayatul Faqih and the Resurgence of Islamic Movements Worldwide. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, [online] 5(1), 36-42 <https://doi.org/10.19109/ampera.v5i01.22868> [Diakses 15 Juni 2025]
- Keddie, N.R. (2006). *Modern Iran: Roots and Results of Revolution*. New Haven: Yale University Press.
- Khamenei, A. (1349 Hs). *Majmū'ah-ye Bayānāt va Sokhanrānīhā (Kumpulan Pidato)*. Tehran: Markaz-e Asnād-e Enqelāb-e Eslāmī.
- Khamenei, A. A. (2005). *Tarh-e kolli-ye andishe-ye Eslami dar Qur'an*. Teheran: Markaz-e Nashr-e Farhangi-ye Enghelab-e Islami.

- Khamenei, A. A. (n.d.). A ruler's legitimacy derives from people or God? Retrieved May 23, 2025, from <https://english.khamenei.ir/news/5048/A-Ruler-s-Legitimacy-Derives-from-People-or-God-Ayatollah-Khamenei> Diakses 23 Mei 2025].
- Khamenei, A. A. (n.d.). Responsibilities of the Supreme Leader. Retrieved May 23, 2025, from <https://english.khamenei.ir/news/6132/What-are-Supreme-Leader-s-responsibilities-Imam-Khamenei-answers> Diakses 23 Mei 2025].
- Kurzman, C. (2004). *The Unthinkable Revolution in Iran*. Cambridge: Harvard University Press.
- Kusumo, A.A.N. (2024). Factors Driving Contemporary Islamic Civilization From Iran's Shiah Perspective. *Journal of Islamic Civilization*, [online] 5(2), 222-236. Dalam: <https://doi.org/10.33086/jic.v5i2.5483> [Diakses 15 Juni 2025]
- Milani, M. (2006). Iran's Islamic Revolution and the International System. *The Middle East Journal*, [online] 60(1), 1–20.
- Pesaran, E. (2008). Towards an Anti-Western Stance: The Economic Discourse of Iran's 1979 Revolution. *Iranian Studies*, [online] 41(5), 693-718. Dalam: <https://doi.org/10.1080/00210860802518343> [Diakses 15 Juni 2025]
- Prorochenko, N. (2020). Iran: from white revolution to islamic anti-Shah revolution (socio-political transformations analysis). *Bulletin of Mariupol State University. Series: History. Political Studies*, [online] 10(28-29), 251-260. Dalam: <https://doi.org/10.34079/2226-2830-2020-10-28-29-251-260> [Diakses 15 Juni 2025]
- Skocpol, T. (1979). *States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Skocpol, T. (1982). *Rentier State and Shi'a Islam in the Iranian Revolution*, Theory and Society, vol. 11, no. 3, hlm. 265–283.
- Vatandoust, G. & Sheipari, M. (2023). Modified J-Curve Theory, Iran's Socio-Economic Bottlenecks and the 1979 Fall of the Pahlavi Monarchy. *Middle East Critique*, [online] 32(1), 111-127. Dalam: <https://doi.org/10.1080/19436149.2023.2168381> [Diakses 15 Juni 2025]